



Implementasi E-Demokrasi Pada Sosial Media Tiktok: Analisis Konten Pandawara Group Sebagai Bentuk Pendorong Aspirasi Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Pemerintah Daerah

Alya Putri Damayanti, Fira Fidiansih, Margaretha Melyani, Syawalia Yazidi

Universitas Indonesia

Abstract

Received: 07 Juli 2024
Revised: 12 Juli 2024
Accepted: 23 Juli 2024

Pandawara Group merupakan sekelompok aktivis lingkungan dan kreator media sosial TikTok yang membagikan konten-konten positif terkait kegiatan peduli lingkungan, yaitu permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan antara konten yang diunggah oleh Pandawara Group di platform media sosial TikTok dengan aspirasi masyarakat terhadap kinerja Lembaga Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi E-demokrasi yang dipengaruhi oleh konten Pandawara Group di TikTok di kalangan masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dilakukan untuk menganalisis konten yang diunggah oleh Pandawara Group di TikTok dan mengkaji hubungannya dengan aspirasi masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten Pandawara Group telah memicu kritik terhadap penanganan isu lingkungan oleh pemerintah daerah. Kritik ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam e-demokrasi, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap manajemen lingkungan pemerintah.

Keywords: *TikTok, Pandawara Group, E-demokrasi, Aspirasi Masyarakat*

(*) Corresponding Author: alvapatridamayanti1304@gmail.com, firafidia00@gmail.com, margarethamelyani@gmail.com, syawalia33alya@gmail.com.

How to Cite: Damayanti, A., Fidiansih, F., Melyani, M., & Yazidi, S. (2024). Implementasi E-Demokrasi Pada Sosial Media Tiktok: Analisis Konten Pandawara Group Sebagai Bentuk Pendorong Aspirasi Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 135-144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13360729>

PENDAHULUAN

Pantai Loji, sebuah tujuan wisata bahari yang terletak di kawasan Geopark Ciletuh, secara tepat berada di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Keunikan pantai ini terletak pada suasana keasrian dan ketenangan, yang berbeda dengan destinasi wisata bahari lain di Sukabumi yang sering dikunjungi oleh banyak pengunjung. Keberadaannya yang tersembunyi menciptakan pengalaman alami dan minim intervensi modern.

Namun, sayangnya, saat ini Pantai Loji mengalami perubahan yang mengkhawatirkan. Keadaan pantai yang sebelumnya indah dan tenang kini tercemar oleh sampah tekstil yang beraneka ragam. Meskipun belum banyak dikenal oleh publik, kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap keindahan dan keberlanjutan Pantai Loji. Pemandangan alam yang dahulu menarik bagi wisatawan sekarang terganggu oleh keberadaan sampah tekstil. Pantai yang didominasi oleh batuan dan sedikit pasir putih ini kini dihadapkan pada permasalahan lingkungan yang memprihatinkan. Selain itu, keberadaan Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu di Pantai Loji menambah kekayaan objek wisata, yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.

Inisiatif pembersihan pantai oleh Pandawara Group, sebuah kelompok pemuda yang bertujuan mengajak seluruh pemuda di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui tindakan nyata, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan aktif membersihkan

lingkungan sekitar, merupakan bentuk partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Konsep E-demokrasi menawarkan potensi keterlibatan lebih luas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penolakan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap kegiatan ini membawa pertanyaan tentang sejauh mana keputusan terkait lingkungan dapat merefleksikan aspirasi masyarakat.

Walaupun potensi besar penggunaan teknologi informasi untuk mendukung partisipasi masyarakat diakui, penolakan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap inisiatif pembersihan pantai menunjukkan adanya hambatan atau tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip E-demokrasi. Penelitian yang diusulkan ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah hambatan tersebut berasal dari aspek teknologis, regulasi, atau kebijakan, yang mungkin menghambat implementasi E-demokrasi dalam konteks kegiatan lingkungan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait masalah ini.

Elemen krusial dalam E-demokrasi adalah tingkat transparansi dan akuntabilitas. Penolakan yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap upaya pembersihan pantai yang dilakukan oleh masyarakat dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini akan berusaha untuk memahami sejauh mana tingkat transparansi dan akuntabilitas dapat dipertahankan dalam konteks tersebut. Dalam kerangka penolakan terhadap inisiatif pembersihan pantai, studi ini akan mendalami alternatif-alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform E-demokrasi. Apakah terdapat strategi-strategi tertentu yang efektif untuk mengatasi rintangan dan meningkatkan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana E-demokrasi dapat mendukung atau terhambat dalam konteks kegiatan lingkungan yang diinisiasi oleh Pandawa Group. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam menggabungkan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan mendorong masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dengan bijak melalui sosial media sebagai upaya berdemokrasi bagi pembangunan negeri.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut adalah pokok permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini.

1. Apakah terdapat keterkaitan antara konten pandawara group dengan aspirasi masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah?
2. Bagaimana bentuk implementasi e-demokrasi masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh konten pandawara group pada media sosial tiktok?
3. Apakah e-demokrasi masyarakat dapat mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis keterkaitan antara konten Pandawara Group dengan aspirasi masyarakat terhadap kinerja Lembaga Pemerintah Daerah
2. Mengidentifikasi bentuk implementasi e-demokrasi masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh konten Pandawara Group pada media sosial TikTok

3. Mempelajari bentuk e-demokrasi masyarakat yang dapat mempengaruhi kinerja Lembaga Pemerintah Daerah

KERANGKA TEORI

E-demokrasi

Teori E-demokrasi merujuk pada gabungan dua kata yaitu “elektronik” yang disingkat menjadi “e” serta kata “demokrasi”, di mana kedua entitas tersebut memiliki makna yang berbeda. Menurut Abraham Lincoln (1865), Demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan, menurut Aristoteles (1984) menyatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan, dan prinsip dasar dari demokrasi adalah kebebasan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaannya terletak pada tangan rakyat, yang mengedepankan prinsip kesetaraan hak dan tanggung jawab, serta memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh warga negara, dan berasaskan pada nilai kebebasan.

Sementara itu, mengenai e-demokrasi yang artinya ada sentuhan teknologi atau informasi pada suatu demokrasi. Menurut Stephen Coleman dan Donald F.Morris (dalam Slamet, dkk, 2009:86) mengartikan E-demokrasi adalah sebagai penggunaan TIK untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja demokrasi. Artinya, bagaimana adanya penggunaan TIK untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses adanya demokrasi. Menurut Fukuyama (2002), masyarakat yang dibangun berdasarkan informasi memiliki kecenderungan untuk menghasilkan dua elemen yang dianggap sangat vital dalam demokrasi modern, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Ini sesuai dengan konsep dasar yang dibangun di atas penggunaan TIK. Dengan kata lain, implementasi TIK ini sejalan dengan bagaimana prinsip-prinsip yang ada pada demokrasi, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan hak, dan kewajiban warga negara, khususnya hak atas informasi.

Harapannya, dengan keberadaan TIK yang telah terkoneksi secara menyeluruh melalui internet saat ini, dapat menyederhanakan proses birokrasi yang kompleks. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas publik terhadap negara (*enabler*). Melalui pemanfaatan teknologi digital, E-demokrasi memiliki tujuan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses politik dengan cara yang lebih sederhana dan cepat. Adanya teknologi dalam demokrasi memungkinkan memfasilitasi keterlibatan warga negara untuk lebih aktif atau berpartisipasi dalam diskusi politik, memberikan kontribusi, dan bahkan bekerja sama dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini membuka peluang terciptanya ruang untuk interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Keamanan dan privasi juga merupakan aspek yang penting dalam penggunaan teknologi dalam proses demokrasi, di mana dalam penggunaannya harus memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi terhadap masyarakat. Transparansi juga menjadi elemen kunci dalam E-demokrasi. Hal ini dikarenakan E-demokrasi akan berupaya meningkatkan keterbukaan dalam proses penetapan keputusan atau kebijakan yang berdampak pada negara dan masyarakat. Transparansi dalam E-demokrasi akan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi publik, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat bahwa itu sesuai dan tidak bertentangan.

Oleh karena itu, demokrasi elektronik atau E-demokrasi dapat diinterpretasikan sebagai inovasi dalam sistem politik yang berfungsi sebagai alat atau sarana untuk memajukan

demokrasi. Hal ini juga dapat digunakan sebagai wadah dalam mendorong aspirasi masyarakat terkait kinerja lembaga Pemerintah Sebab E-demokrasi juga memungkinkan terjadinya interaksi tanpa hambatan antara masyarakat dan lembaga pemerintahan yang mewakili mereka.

TIK

TIK atau dalam Bahasa Inggris disingkat menjadi ICT (*Information Communication and Technology*). Di mana mencakup kata teknologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*technologia*” atau “*techne*” yang memiliki arti “keahlian” atau “keterampilan”. Selain itu, terdapat juga kata “*logia*” yang artinya adalah “pengetahuan” atau “ilmu”. Oleh karena itu, secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai kombinasi dari keahlian atau keterampilan dengan pengetahuan. Jika dilihat dalam konteks modern, teknologi ini mengacu pada penerapan atau mengimplementasikan suatu pengetahuan atau ilmu dengan keterampilan yang mencakup dengan penggunaan alat, mesin, sistem, atau perangkat lunak untuk memudahkan aktivitas manusia.

Beberapa ahli berpendapat mengenai apa itu TIK. Menurut Eric Deeson (1991), TIK adalah suatu kebutuhan bagi manusia dalam melaksanakan tahapan mengambil, mentransfer, mengolah, dan memproses informasi dalam situasi sosial yang memberikan keuntungan baik secara personal maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, menurut Haag dan Keen (1996), TIK dapat diartikan sebagai kumpulan perangkat yang mendukung aktivitas manusia dalam pekerjaan. Dalam konteks ini, manusia dibantu dengan informasi dan dapat menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan mekanisme informasi. TIK bisa dipahami sebagai kumpulan teknologi bagaimana informasi akan disampaikan dan diproses melalui perangkat teknis dalam cakupan TIK.

Media Sosial: TikTok

Keterkaitan antara TIK dengan platform media sosial sangat erat dan saling mempengaruhi. Media sosial adalah bentuk hasil dari majunya TIK, dan media sosial juga menjadi bagian yang membuat penerapan TIK ini cepat berkembang. Pengertian media sosial umumnya adalah sarana komunikasi yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan individu dengan individu lainnya. Media sosial bisa menjadi wadah untuk demokrasi. Sebab, media sosial berguna untuk berbagi informasi serta interaksi berupa komunikasi untuk bersuara dalam berdemokrasi.

Kata “media” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*medius*” yang secara harfiah artinya “tengah” atau “perantara”. Sedangkan, media sosial merupakan bagian integral dari media komunikasi. Media sosial merupakan platform berbasis online yang mendorong interaksi sosial. Beberapa platform media sosial seperti. *Instagram, X (Twitter), Facebook, dan TikTok*.

TikTok merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial serta platform video - video kreatif yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan menonton video dengan filter-filter yang tersedia serta diiringi lagu - lagu. Hal ini mendorong masyarakat untuk kreatif menciptakan video yang bermanfaat agar dilihat banyak orang. Sehingga, kini aplikasi platform TikTok telah menjadi salah satu aplikasi yang digemari di kalangan pengguna. TikTok menjadi wadah bagi pengguna untuk berkreaitivitas, bernyanyi, menari, challenge, lipsync, sharing pengetahuan, bahkan berdemokrasi.

Aplikasi TikTok dirilis pada awal September tahun 2016 oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok yaitu ByteDance yang didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Zhang Yiming. Sebelum dikenal secara dunia, TikTok dikenal dengan aplikasi yang bernama Douyin

yang secara harfiah artinya yaitu “Teknik musik pendek”. Lalu aplikasi ini direspon positif oleh para pengguna di Tiongkok dan cukup populer. Oleh karena itu, ByteDance akhirnya berupaya untuk memperkenalkan aplikasinya kepada masyarakat dunia dan memutuskan untuk mengganti nama Douyin menjadi TikTok. Kemudian, pangsa pasar TikTok terus menunjukkan peningkatan secara global. Di Indonesia, aplikasi TikTok diluncurkan pada September 2017. Bahkan saat ini, TikTok menjadi wadah mata pencaharian baru bagi kaum milenial dengan membuat banyak konten kreatif dan menjadi konten kreator.

Peran Pemerintah Daerah

Indonesia merupakan negara hukum yang dilandasi oleh ideologi Pancasila. Dalam Pancasila disebutkan pada sila ke-4, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengacu pada kerakyatan yang mengarah kepada “demokrasi” sebagai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan serta kerangka pemerintahan negara Indonesia diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Terkait kerangka pemerintahan, terdapat lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia diantaranya adalah lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, serta lembaga pemeriksa keuangan.

Lembaga pemerintah daerah diatur pada pasal 18 ayat 1-7 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi kembali menjadi kabupaten atau kota. Pemerintahan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut diberikan otonomi seluas-luasnya dalam menjalankan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang sudah ditetapkan pada undang-undang oleh pemerintah pusat. Secara lebih jelas, peraturan yang mengatur terkait pembentukan, kewenangan, kedudukan, dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, peran atau fungsi pemerintah daerah adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, serta meningkatkan daya saing daerah, dan pemeliharaan hubungan dengan pemerintah pusat atau daerah lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Davey (Adisasmita 2011) mengemukakan lima fungsi dari pemerintah daerah, yaitu (1) Penyedia pelayanan. Pemerintah daerah berfungsi sebagai penyedia pelayanan yang berfokus pada masyarakat dan pengendalian lingkungan; (2) Pengaturan. Pemerintah daerah merupakan lembaga yang merumuskan dan menegakkan peraturan-peraturan daerah; (3) Pembangunan. Pemerintah daerah dapat terlibat langsung dalam pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi; (4) Perwakilan. Sebagai penyalur pendapat-pendapat daerah diluar tanggung jawab eksekutif yang dilakukan pihak legislatif; (5) Koordinasi dan Perencanaan. Secara keseluruhan, pemerintah daerah berperan sebagai penyedia, pengelola, dan pemelihara segala aspek dalam pemerintahan daerah yang berorientasi pada masyarakat. Dengan artian pemerintah daerah perlu menerima serta mengembangkan aspirasi-aspirasi di masyarakat yang bertujuan baik bagi sesama, tentunya dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan mendeskripsikan fenomena atau masalah sosial yang sedang diteliti. Pemilihan metode kualitatif oleh peneliti dilakukan karena peneliti ingin menjelaskan secara deskriptif terkait penelitian langsung melalui pendekatan analisis konten. Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi atau pengamatan terhadap konten Pandawara Group di TikTok, menganalisis artikel di media massa, dan menganalisis melalui jurnal mengenai Pandawara Group. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “IMPLEMENTASI E-DEMOKRASI PADA SOSIAL MEDIA TIKTOK: ANALISIS KONTEN PANDAWARA GROUP SEBAGAI BENTUK PENDORONG ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH”. Kemudian, pengamatan dilakukan dengan cara menonton dan mencatat berbagai hal yang penting dari konten Pandawara Group. Analisis konten dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep dan tema yang ada dalam konten Pandawara Group. Kemudian konsep dan tema tersebut dianalisis untuk memahami lebih lanjut bagaimana konten tersebut dapat mendorong aspirasi masyarakat dalam melakukan E-demokrasi terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pemerolehan data sekunder sebab sumber informasi yang digunakan dan diperoleh didapatkan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui konten-konten Pandawara Group pada aplikasi TikTok, artikel media massa, jurnal ilmiah, serta studi literatur yang membahas terkait kasus Pandawara Group. Penggunaan data dari berbagai sumber tersebut bertujuan untuk mendukung dan memperkuat analisis yang dihasilkan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Kronologi Studi Kasus

Pandawara Group, sebuah kelompok pemuda yang peduli terhadap lingkungan, muncul ke permukaan saat mereka berusaha membersihkan pantai Loji di Sukabumi. Namun, upaya mereka ditolak oleh kepala desa setempat, menciptakan dinamika yang menarik seputar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Awalnya, Pandawara Group merekam video kegiatan bersih-bersih mereka dan membagikannya di platform media sosial seperti TikTok. Video tersebut menjadi viral, menampilkan pantai Loji yang dipenuhi sampah yang didominasi bahan tekstil di Kampung Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pantai loji dijuluki sebagai pantai terkotor ke-4 di Indonesia. Pemandangan yang mencolok ini menarik perhatian publik dan mendorong kelompok tersebut untuk menyuarakan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Keputusan kepala desa setempat untuk menolak inisiatif Pandawara Group menjadi titik awal kontroversi. Pandawara Group awalnya menghadapi penolakan dalam merealisasikan aksi bersih-bersih mereka di pantai Loji. Namun, Sekretaris Desa, Dede Mulyadi, membantah penolakan tersebut dengan menyatakan adanya miskomunikasi antara kelompok pemuda, pihak kepala desa, dan karang taruna setempat. Proses ini mencerminkan peran penting transparansi dan komunikasi yang efektif dalam konteks pengelolaan lingkungan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walhi Nasional turut berbicara dalam kontroversi ini, mendukung inisiatif Pandawara Group dan menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai seharusnya diterima oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, aspek E-demokrasi atau demokrasi berbasis elektronik dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk menggalang dukungan masyarakat dan menyuarakan aspirasi terkait isu lingkungan.

Pandawara Group menjawab penolakan tersebut dengan merilis video di TikTok yang mendokumentasikan kondisi pantai Loji dan menyatakan niat mereka untuk membersihkan pantai tersebut pada tanggal 06 dan 07 Oktober 2023. Kepala Desa Sangrawayang, Muhtar, tetap bersikukuh menolak kegiatan bersih-bersih, dengan alasan bahwa pemerintah desa seolah tidak dilibatkan dalam inisiatif tersebut. Munculnya perbedaan pandangan ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara kelompok masyarakat dan pemerintah lokal dalam konteks kebijakan lingkungan.

Sementara itu, melalui platform media sosial, Pandawara Group terus berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan informasi bahwa mereka telah mendapatkan izin dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta aparat desa. Pada saat ini, peran teknologi dan media sosial menjadi kunci dalam menyebarkan informasi dan merespons kekhawatiran masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, Sekretaris Desa Sangrawayang, Dede Mulyadi, menduga bahwa penolakan awal dari kepala desa mungkin disebabkan oleh miskomunikasi, menegaskan bahwa penolakan bukan terhadap aksi bersih-bersih itu sendiri, melainkan penolakan terhadap viralkan kegiatan tersebut. Ini menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dan pemahaman bersama dalam mencegah konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pandawara Group tetap pada niat mereka untuk membersihkan pantai Loji, menggandeng warga setempat dalam upaya bersama. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah berhasil membersihkan beberapa pantai lain di berbagai lokasi, menciptakan kolaborasi antara instansi dan masyarakat.

Kasus ini mencerminkan bahwa perubahan sosial, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan, dapat didorong oleh partisipasi aktif masyarakat. Teknologi dan media sosial menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi, merespons penolakan, dan membangun kesadaran publik. Dalam perspektif E-demokrasi, keterlibatan masyarakat melalui platform daring dapat menjadi kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dan mencapai perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan.

A.Keterkaitan antara Konten Pandawara Group dengan Aspirasi Masyarakat terhadap Kinerja Lembaga Pemerintah Daerah

E-demokrasi menjadi istilah yang tidak asing di era digitalisasi saat ini. Berbagai aspirasi dari masyarakat semakin bermunculan melalui media sosial yang ada, tidak terkecuali TikTok. Pandawara Group menjadi salah satu contoh dari bentuk aspirasi masyarakat yang menyuarakan dalam lingkup sosial dan lingkungan di Indonesia. Berdasarkan analisis penelitian, terdapat relasi antara konten Pandawara Group dengan aspirasi masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah.

Dengan 8,4 juta pengikut pada laman sosial media TikTok, tidak dapat dipungkiri bahwa Pandawara Group dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar mereka. Dari kesadaran tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat

secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat melalui kolaborasi Pandawara Group yang membersihkan lingkungan pantai di daerah lain dengan masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat lainnya pun turut menyuarakan aspirasinya untuk menyemangati Pandawara Group dan sesama masyarakat lainnya agar terus beraksi menjaga kebersihan lingkungan.

Di samping itu, konten dari Pandawara Group juga menuai kritik bagi pemerintah daerah setempat yang dibuktikan dengan banyaknya aspirasi pada kolom komentar video terkait, maupun adanya masyarakat yang membuat video pribadi untuk mengemukakan pendapatnya. Masyarakat cenderung menyuarakan keresahannya terhadap kinerja pemerintah daerah yang kurang tanggap dan cekatan dalam mengatasi isu lingkungan di daerah terkait. Hal tersebut juga didorong oleh bentuk konten yang terlihat nyata, bukan hanya pencitraan semata. Tidak dapat dipungkiri terdapat masyarakat yang geram akan pemerintah yang seolah-olah tidak tahu malu atas konten-konten yang telah dibuat Pandawara maupun masyarakat. Pemerintah dinilai memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan, karena baru bertindak setelah lingkungan sekitarnya viral karena aspirasi dan konten yang ada.

B.Implementasi e-Demokrasi Masyarakat Indonesia yang Dipengaruhi oleh Konten Pandawara Group pada Media Sosial TikTok

Implementasi e-demokrasi kini dapat dijumpai dalam berbagai platform media sosial. Masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya, selama masih relevan dan tidak menyebabkan kegaduhan, seperti menyinggung SARA dan menyebarkan berita hoaks. Dalam media sosial TikTok, para pengguna aplikasi dapat memberikan berbagai reaksi dari video yang mereka saksikan, seperti membagikan konten memberikan *like* dan juga berkomentar.

Berdasarkan analisis pada konten studi kasus terkait, masyarakat mulai mengimplementasikan E-demokrasi dengan ikut serta secara aktif dalam berinteraksi, berdiskusi mengenai konten yang ada melalui kolom komentar. Jumlah likes pada konten tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat setuju dan mendukung aksi nyata dari Pandawara Group. Ada pula masyarakat yang membuat konten tanggapan sebagai bentuk respon mereka untuk menyuarakan aspirasi dukungannya.

Pandangan dan kritik masyarakat terhadap pemerintah daerah pun juga merefleksikan bahwa implementasi E-demokrasi pada konten Pandawara Group dapat dibuktikan keberadaan dan keberanannya. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktik pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat mengemukakan pendapatnya dan berdialog dengan pemerintah untuk berbenah diri, memperbaiki kekurangannya. Sehingga, hubungan pemerintah dan masyarakat pun diharapkan akan terjalin lebih baik.

C.Pengaruh E-demokrasi Masyarakat padai Kinerja Lembaga Pemerintah Daerah

Dalam kasus pandawara Group membuktikan bahwa E-demokrasi membawa dampak positif terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah perihal mengelola lingkungan. E-demokrasi bisa menjadi alat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka terkait isu lingkungan. Hal ini bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, sebab mereka dapat dengan mudah menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai platform media sosial yang tersedia. E-demokrasi memiliki potensi untuk mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Ini dikarenakan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi mengenai

kinerja pemerintah daerah melalui berbagai platform media sosial. Disamping itu, E-demokrasi juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Ini disebabkan oleh keterlibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan lingkungan, yang cenderung membuat kebijakan tersebut lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan adanya perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan berinteraksi dan berkomunikasi dapat menunjang e-demokrasi. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat keterkaitan, bentuk implementasi, dan juga pengaruh e-demokrasi masyarakat terhadap pemerintah daerah yang didorong oleh konten Pandawara Group. Kasus Pandawara Group menunjukkan bahwa penggunaan E-demokrasi, terutama melalui media sosial seperti TikTok, memiliki dampak positif dalam mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Dengan memanfaatkan E-demokrasi, Pandawara Group berhasil menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan menggalang dukungan masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mendorong implementasi E-demokrasi di Indonesia dan menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat melalui media sosial dapat membawa dampak positif terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan.

Pada kasus ini dapat dijadikan sebagai dorongan bagi lembaga pemerintah daerah untuk memanfaatkan media sosial dan platform E-demokrasi lainnya untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memperoleh masukan terkait pengelolaan lingkungan. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung implementasi E-demokrasi di tingkat lokal, sehingga partisipasi aktif masyarakat dapat lebih terfasilitasi. Kemudian perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah daerah terkait pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam menjaga lingkungan, serta bagaimana E-demokrasi dapat mendukung hal tersebut. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mendengarkan, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara efektif, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pemerintah daerah*. Graha Ilmu.
- Aksi Pandawara Group bersihkan Pantai Loji sempat ditolak kepala desa - Mengapa sampah di pesisir atau sungai tak diurus? (2023, October 4). *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1jd17p9j7o>
- Astawa, I. P. A. (2017). *DEMOKRASI INDONESIA*.
- Hendrawan, F. (2015). *PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI : STUDI KASUS PT.TAT*.
- J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat*. (n.d.). DPR RI. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Maghdalena, M. A. (2023). *GERAKAN SOSIAL KOMUNITAS LINGKUNGAN PANDAWARA GROUP DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN*. <http://repository.upi.edu>

Ramadhan, R. E. P., & Rochmaniah, A. (2023). *Analisis Konten Edukasi Sampah pada Akun TikTok @Pandawaragroup*. 10.21070/ups.3190

Slamet, Hamdan, A. R. b., & Deraman, A. (2009). *E-DEMOKRASI DI INDONESIA, ANTARA PELUANG DAN HAMBATAN PENDEKATAN FENOMENOLOGIS*.

Sondakh, R. A., Erawan, E., & Wibowo, S. E. (2019). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PADA AKUN @GEPREKEXPRESS DALAM MEMPROMOSIKAN RESTORAN GEPREK EXPRESS*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. (n.d.). DPR RI.
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

UU No. 23 Tahun 2014. (n.d.). Peraturan BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Winarso, B. (2021, June 8). *Apa Itu TikTok dan Apa Saja Fitur-fiturnya?* DailySocial. Retrieved December 7, 2023, from <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok>